BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SABTU, 21 SEPTEMBER 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERISAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Masih Ada Randis Nunggak Pajak

BENTENG - Sekitar 25 persen dari seluruh kendaraan dinas (Randis) milik Pemkab Bengkulu Tengah (Benteng), diketahui masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Nilai dan jumlah tahun menunggak pun bervariasi, bahkan ada yang lebih dari lima tahun. Hal ini, mestinya menjadi perhatian Pemkab, karena pajak kendaraan dinas sudah dianggarkan melalui APBD.

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPKD Provinsi Bengkulu di Kabupaten Benteng, Ahmad Hendi, SE, MM didampingi Kasi Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Syafrudin, S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (20/9) menjelaskan, hal tersebut memang menjadi perhatian serius. Hal itu berdampak pada pengurangan target dari pendapatan pajak untuk kendaraan bermotor. Apalagi target untuk penerimaan pajak, dari tahun ke tahun terus meningkat. "Yang di UPTD BPKD Benteng, khusus untuk pajak kendaraan bermotor," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng, Welldo Kurniyanto, SE, M.Si membenarkan jika masih ada beberapa kendaraan dinas menunggak pajak. Namun, untuk diketahui, kendaraan dinas yang menunggak bukan berada di Pemkab Benteng secara langsung. Seperti kendaraan dinas yang berada di tangan Kades berupa motor dinas di 142 desa. Ada juga kendaraan dinas yang dipinjampakaikan kepada instansi vertikal seperti KPU Benteng, Bawaslu dan juga beberapa instansi vertikal lainnya.

Tanpa maksud membela diri, salah satu contoh kendaraan dinas yang menunggak pajak adalah kendaraan yang dipinjamkan ke KPU Benteng. "Tunggakannya sampai dengan 8 tahun," ujarnya.

Seharusnya, kendaraan dinas yang dipinjampakaikan tersebut sesuai aturan menjadi tanggung jawab pemakai. Mulai dari pemeliharaan, hingga pembayaran pajaknya. Namun, tidak demikian hal tersebut justru banyak yang sampai menunggak pajak.

Atas kondisi ini, beberpaa kendaraan dinas sudah ditarik, termasuk di KPU Benteng. Selain menunggak pajak hingga bertahun-tahun, juga mengalami banyak kerusakan. "Yang sudah kami tarik, kami perbaiki dulu sebelum digunakan kembali untuk dinas di Pemkab Benteng," tutupnya. **(vla)**